

# Memandang KPK sebagai Sisyphus

Oleh Triyono Lukmantoro

Panitia Seleksi (Pansel) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 145 calon yang lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti proses selanjutnya. Beberapa figur berhasil melewati tahap ini, yakni Bambang Widjojanto, Jimly Asshiddiqie dan Busyro Muqoddas. Nama-nama advokat yang dikenal sebagai pembela koruptor juga berhasil melewati seleksi awal itu.

Seleksi administrasi merupakan hal yang mudah. Tapi, menentukan pengganti Antasari Azhar adalah pekerjaan sulit. Bukan karena figur Antasari yang layak dinilai berhasil memberantas kasus-kasus korupsi tingkat tinggi yang menjadi substansi permasalahannya. Problem yang lebih esensial adalah KPK sebagaimana layaknya Sisyphus yang terkena hukuman dari para dewa.

Dalam mitologi Yunani dikisahkan, Sisyphus mendapat hukuman mendorong batu berukuran besar sampai ke puncak bukit. Setelah batu itu sampai di puncak, Zeus sebagai pemimpin para dewa menendang batu itu hingga menggelinding ke dasar. Sisyphus harus kembali menuruni bukit dan mendorong batu ke atas. Pekerjaan itu harus dijalankan Sisyphus tanpa berhenti.

Apa artinya sosok Sisyphus bagi KPK? Memang, KPK telah dijadikan sebagai organisasi yang memiliki kewenangan besar untuk menangkap dan menghukum para koruptor. Tapi, banyak pihak yang tidak menyukai berbagai gebrakan yang dijalankan KPK. Simak bagaimana KPK pernah diposisikan sebagai Cicak yang melawan Buaya (kepolisian) seperti dikatakan mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Komjen Susno Duadji. Beruntunglah KPK karena meraih dukungan luas dari publik, terutama dari para *facebookers*.

Belum cukup dengan itu, Antasari Azhar dipidanakan karena dianggap sebagai aktor intelektual dalam pembunuhan berencana terhadap Nasrudin Zulkarnaen. Lalu, dua pimpinan KPK, yakni Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah, harus menghadapi kriminalisasi. Stigma sebagai pelaku kejahatan begitu lekat dengan para pimpinan KPK. Inilah yang dipakai musuh-musuh KPK untuk memojokkan lembaga *superbody* itu, dengan alasan legal maupun moral.

Sisyphus merupakan sosok yang sedemikian menderita. Hukuman mendorong batu besar dari dasar hingga ke puncak bukit secara berulang-ulang bisa dipandang

sebagai tindakan yang penuh absurditas, yakni perilaku yang sulit diterima nurani dan nalar. Tapi, itulah hukuman yang harus dijalankan Sisyphus. Demikian halnya dengan KPK. Sebagai institusi yang sengaja diciptakan memberangus kalangan pencuri uang negara, para pimpinannya justru dituding sebagai pelaku kriminalitas.

### **Sebagai inspirator**

Tapi, Sisyphus bisa dijadikan sebagai inspirator untuk menjalankan kehidupan ini yang dibanjiri absurditas. Filosof Albert Camus (1913-1960) memakai metafora Sisyphus untuk memotret situasi tanpa kejelasan dalam kehidupan. Pada *Mite Sisifus: Pergulatan dengan Absurditas* (1999), Camus menyatakan Sisyphus adalah bawahan proletar para dewa. Sisyphus tidak berdaya, tapi dia memberontak. Pemberontakan itu menunjukkan eksistensi manusia yang menerima takdir dengan gembira. “Kita harus membayangkan Sisifus berbahagia,” tegas Camus.

Dalam uraian P.A. van der Weij tentang eksistensialisme Camus (*Filsuf-Filsuf Besar tentang Manusia*, 2000), dinyatakan bahwa kita mengatakan “ya” dan serentak juga “tidak” untuk kehidupan. “Tidak” kita katakan kepada absurditas, ketidakadilan, penderitaan orang yang tidak berdosa, dan secara radikal kepada kematian. “Ya” kita katakan kepada keinginan dasar akan keadilan dan kebaikan. “Ya” serta “tidak” itu bersama-sama membentuk pemberontakan. Itulah satu-satunya sikap masuk akal bagi kehidupan yang absurd. Dengan memberontak, penderitaan perorangan dipikul semua orang. Pada momentum itu, penegasan Camus yang menyatakan “Saya melawan, jadi kita ada” bisa dipahami maksudnya.

Ketika kita melihat KPK sebagai Sisyphus bukan dimaksudkan KPK dibiarkan merana dalam kesendiriannya akibat dikerangkeng kenestapaan. Tapi, justru KPK didukung. Bukankah maksud diciptakannya KPK adalah untuk melawan korupsi yang semakin merajalela? KPK dibentuk untuk menyatakan “ya” terhadap keadilan dan kebaikan yang menjauh dari negeri ini. KPK dibentuk untuk menegaskan “tidak” pada absurditas yang menyuburkan ketidakadilan. Semua bentuk pengerdilan KPK wajib dilawan, untuk menegaskan pemberantasan korupsi masih ada. Memilih pimpinan KPK adalah pemberontakan terhadap semua jenis tindakan korupsi.

### **Pekerjaan sia-sia**

Tapi, di sisi lain, sosok Sisyphus dapat juga dipandang sebaliknya. Apa yang dilakukan Sisyphus adalah pekerjaan sia-sia. Bahkan, Kathleen N. Daly (*Greek and*

*Roman Mythology A to Z*, 1992) menyatakan Sisyphus menjadi simbol dari kewajiban yang tidak membuahkan hasil. Dalam perspektif ini, KPK sebagai Sisyphus berarti semua gebrakan yang dilakukan KPK jauh dari apa yang diharapkan. Memilih secara ketat pimpinan KPK menjadi ritual yang terkesan serius dan sakral, namun hasil yang diperoleh justru nihil besar. Hal itu dapat terjadi karena panitia seleksi merupakan lembaga bentukan pemerintah yang dicurigai penuh kepentingan politik. Selain itu, penentuan pimpinan KPK dilakukan para wakil rakyat yang boleh jadi menentang semua agenda pemberantasan korupsi.

Problem lain yang lebih parah ialah secara kultural korupsi tidak dipandang sebagai kejahatan melawan kemanusiaan. Thomas Taro Lennerfors (*The Vicissitudes of Corruption*, 2008) menguraikan, awalnya korupsi dimaknai dengan pembusukan (degenerasi) kehidupan manusia. Selanjutnya, korupsi dimaknai sebagai transgresi (pergeseran) ketika ranah publik digunakan untuk merealisasikan ambisi pribadi. Puncaknya, korupsi diartikan sebagai kenikmatan (*jouissance*) yang berarti meskipun korupsi dilihat sebagai kejahatan, tapi perilaku itu dipraktikkan dengan rasa senang.

Sisyphus mana yang seharusnya diterapkan pada KPK? Tentu saja, Sisyphus dalam perspektif Camus. Tapi, untuk mewujudkannya tidak gampang. Jangan-jangan sosok yang terpilih nanti tidak membantu Sisyphus mendorong batu besar, melainkan menjadi batu yang justru menambah beban. Apalagi, jika korupsi dimaknai sebagai kenikmatan. Memilih pimpinan KPK, pada akhirnya, menjadi absurditas itu sendiri.

\* \* \*

***Triyono Lukmantoro, dosen FISIP Universitas Diponegoro Semarang.***  
(*Bisnis Indonesia*, 15 Juli 2010)